



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

TAHUN 2018-2023



Kata Pengantar

Renstra perubahan ini disusun untuk menyempurnakan rencana program dan kegiatan yang sebelumnya telah tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023, dengan formulasi yang lebih tepat sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang lebih maksimal. Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung .

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stake-holders*) pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan sampai dengan saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018- 2023 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Bandung hingga tahun 2023. Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kota Bandung dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan.

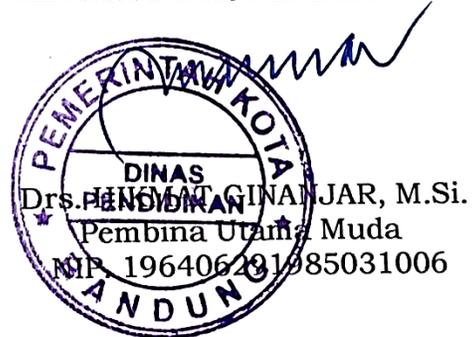
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018- 2023 bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota

Bandung dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran bidang pendidikan Pemerintah Kota Bandung.

Harapan kami semoga dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Pendidikan Kota Bandung, di ucapkan terima kasih.

Bandung, Desember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bandung	11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG.....	24
3.1. Permasalahan Dinas Pendidikan Kota Bandung	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.....	24
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung.....	32
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung.....	37
4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung .	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
BAB VIII PENUTUP	91

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan	5
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	11
Gambar 2.2 Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah	15
Gambar 2.3 Angka Kelulusan Sekolah Dasar	16
Gambar 2.4 Angka Kelulusan SMP.....	17
Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung.....	34
Gambar 3.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung	35

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah PNS Dinas Pendidikan	12
Tabel 2.2	Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.3	Tenaga Pendidik Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian....	13
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020	13
Tabel 2.5	Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas	14
Tabel 2.6	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kota Bandung Tahun 2016-2020.....	18
Tabel 2.7	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2016-2020.....	19
Tabel 2.8	Persentase Guru Berpendidikan minimal S1 di Kota Bandung Tahun 2016-2020	19
Tabel 2.9	Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2016-2020.....	20
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2016-2020	20
Tabel 4.1	Perubahan Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandung	38
Tabel 4.2	Perubahan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung.....	38
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Pendidikan Setelah Reviu	39
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021-2023	39
Tabel 4.5	Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung 2021-2023	41
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan setelah perubahan PRJMD	45
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung Sebelum Perubahan RPJMD	49
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung Setelah Perubahan RPJMD	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tujuan Pendidikan Nasional sesuai yang tercantum pada Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Karena itu pendidikan menempati salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam menghadapi perkembangan baik nasional maupun internasional yang demikian mengglobal dan semakin kompleks, maka menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan bidang yang harus mampu menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul.

Pada tingkat Nasional, program yang dilaksanakan tetap mengacu pada 7 program prioritas, yaitu pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, program kampus merdeka dan pemajuan budaya dan bahasa

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumber Daya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani serta kepribadian

yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial, dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara *top-down planning* dan *bottom-up planning* berbasis anggaran, terpadu dan terprogram.

Selaras dengan tuntutan perkembangan di masa mendatang, Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023). Akan tetapi Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 30 November Tahun 2021, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Adapun yang melatar belakangi perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMD Tahun 2020-2024
 - Penyelarasan sasaran, Prioritas Pembangunan Daerah dengan sasaran, Prioritas Pembangunan Nasional;
 - Penyelarasan Program dan Kegiatan strategis Daerah dengan Program dan Kegiatan strategis Prioritas Nasional
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penyesuaian struktur Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PPKD
 - Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah (dan pemutakhirannya berdasarkan Kepmendagri 050-3708)
4. Hasil Evaluasi RPJMD Dampak Pandemi COVID-19
 - Penyesuaian Prioritas Pembangunan
 - Penyesuaian Tema Pembangunan
 - Reformulasi target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
5. Permendagri No. 18 Tahun 2020
 - Penyesuaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output dengan Permendagri 18/2020
6. Perubahan KLHS
 - Penyesuaian Gambaran Umum terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Bandung
 - Penyesuaian Permasalahan dan Isu Strategis
 - Penyesuaian Program terhadap Rekomendasi KLHS
7. Rekomendasi Kemenpan RB (Evaluasi AKIP)
 - Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta indikatornya
8. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020
 - Melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat dan terukur terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, khususnya di kaitkan dengan pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
 - Hasil monev ini diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan dalam perencanaan selanjutnya

Dalam RPJMD perubahan tersebut ditegaskan bahwa visi pembangunan Kota Bandung yang akan dicapai adalah “Terwujudnya *Kota Bandung yang nyaman, unggul, sejahtera, dan agamis*”.

Visi pembangunan Kota Bandung tersebut dijabarkan ke dalam empat misi sebagai berikut: (1) Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing, (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani, (3) Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan, (4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, (5)

Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Keselarasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan dielaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakannya.

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program pembangunan daerah dalam RPJMD Perubahan yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
5. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
6. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
7. Tata kelola pemerintahan
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti perubahan perda RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 serta untuk mengimplementasikan program dan kebijakan tersebut,

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Dinas Pendidikan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD

b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra

Rapat koordinasi ini diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan Kota Bandung serta *stakeholder* lainnya, dengan materi rancangan awal Renstra.

c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi kemudian disusun Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

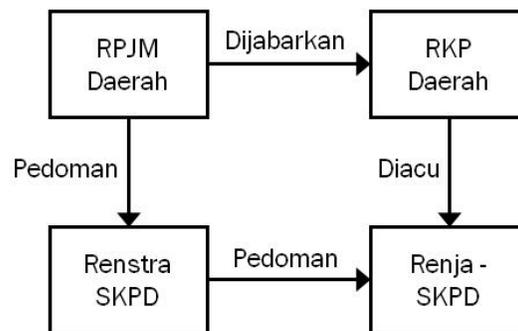
a. Hubungan Renstra dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

b. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan (Renja-SKPD)

Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam dua gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
- 14) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
 - 15) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 - 16) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
 - 17) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
 - 18) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
 - 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3).
 - 20) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi serta melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi organisasi, khususnya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mengacu kepada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023..

b. Tujuan

1. Menyusun sejumlah langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
2. Membangun agenda dan langkah kerja yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, Landasan hukum, maksud, dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan

Memuat informasi tentang peran, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah: tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan

Bagian ini menyajikan informasi mengenai: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan: telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan bidang pendidikan di Kota Bandung.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan

mengenai program Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam jangka menengah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program beserta indikator kinerja, pagu indikatif target.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian ini menyajikan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai berikut:

a. Tugas Pokok.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan.

b. Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas. maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan lingkup pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan lingkup pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pendidikan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi.

Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Tipe A, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

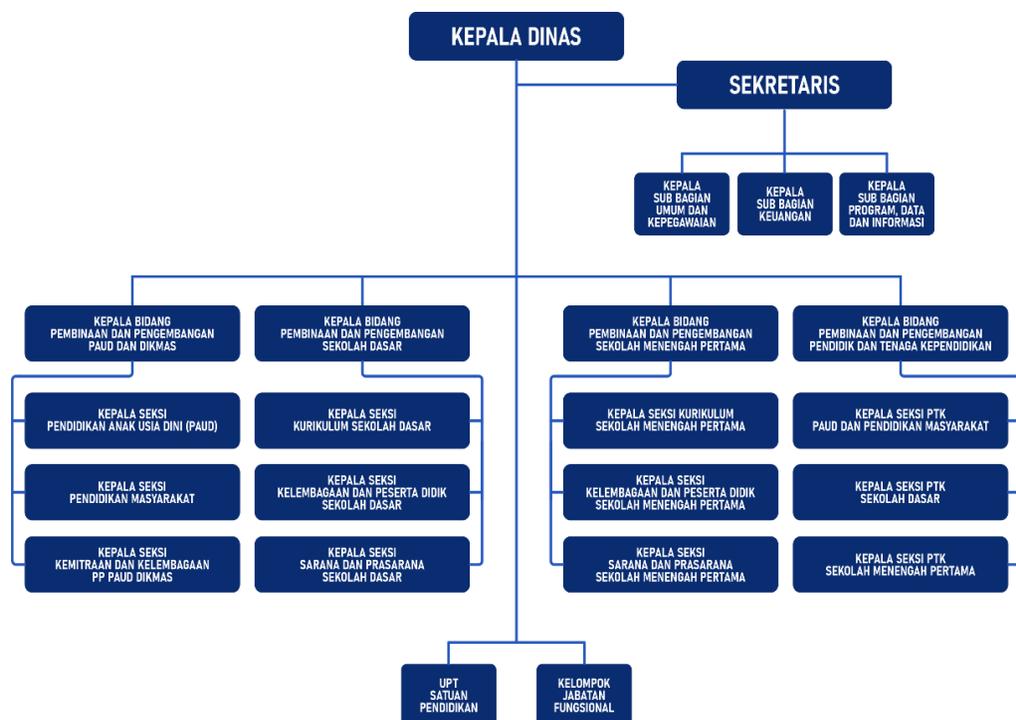
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi,
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, yang membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat
 3. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan

- d. Bidang Pembinaan & Pengembangan Sekolah Dasar, yang membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum
 2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum
 2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan, yang membawahkan:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung:



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bandung

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Bandung termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar sampai dengan bulan November 2021 sebanyak 378 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Asset, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program Data dan Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tabel 2.1
Jumlah PNS Dinas Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Struktural	114 orang
2.	Pengawas TK	5 orang
3.	Pengawas SD	41 orang
4.	Pengawas SMP	48 orang
5.	Penilik	46 orang
6.	Pamong Belajar	24 orang
Jumlah		378 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Tahun 2021

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebanyak 19.778 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
PAUD NON FORMAL	1319	95	35	113	938	29	4	2533
TK	239	11	98	39	8878	534	7	9806
SD	49	21	15	58	4523	624	10	5300
SMP	125	50	26	26	1806	100	6	2139
Total	1732	177	174	236	16145	1287	27	19778

Sumber : Sub Bagian Program (DAPODIK) Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 2.3

Tenaga Pendidik Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

Jenjang	PNS	NON PNS	Jumlah
PAUD NON FORMAL	1	2532	2533
TK	4430	5376	9806
SD	1930	3370	5300
SMP	346	1793	2139
Total	6707	13071	19778

Sumber : Sub Bagian Program (DAPODIK) Dinas Pendidikan Tahun 2021

b. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pendidikan Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.4

Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2016	Rp. 290.643.775.619,00	Rp. 263.256.480.390,00	90,58
2	2017	Rp. 1.331.926.412.870,00	Rp. 1.193.461.836.024,00	89,60
3	2018	Rp. 411.904.967.463,00	Rp. 344.363.771.799,00	83,60
4	2019	Rp. 1.060.239.234.094,91	Rp. 558.145.131.897,00	52,64
5	2020	Rp. 521.869.537.061,85	Rp. 467,552,770,738.00	89,59

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 telah terjadi Pandemi *covid-19* di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemi *covid-19* ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Dengan anggaran yang terbatas, maka anggaran Kota Bandung diprioritaskan kepada program pemulihan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19.

Namun demikian, meskipun anggaran mengalami penurunan, secara kinerja, capaiannya sebagian besar memenuhi target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target kinerja. Target kinerja yang tidak

tercapai lebih disebabkan kepada koordinasi internal Bappelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang optimal.

c. Sarana Prasana Instansi

Dinas Pendidikan Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No 239, Bandung, Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
PAUD NON FORMAL	665	1.841	1.841	-	-
SD	471	5.863	5.847	13	3
SMP	261	3.592	3.592	-	-
TK	493	1.660	1.660	-	-
Total	1.890	12.956	12.940	13	3

Sumber : Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

1) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$EYS'_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$$

Dimana:

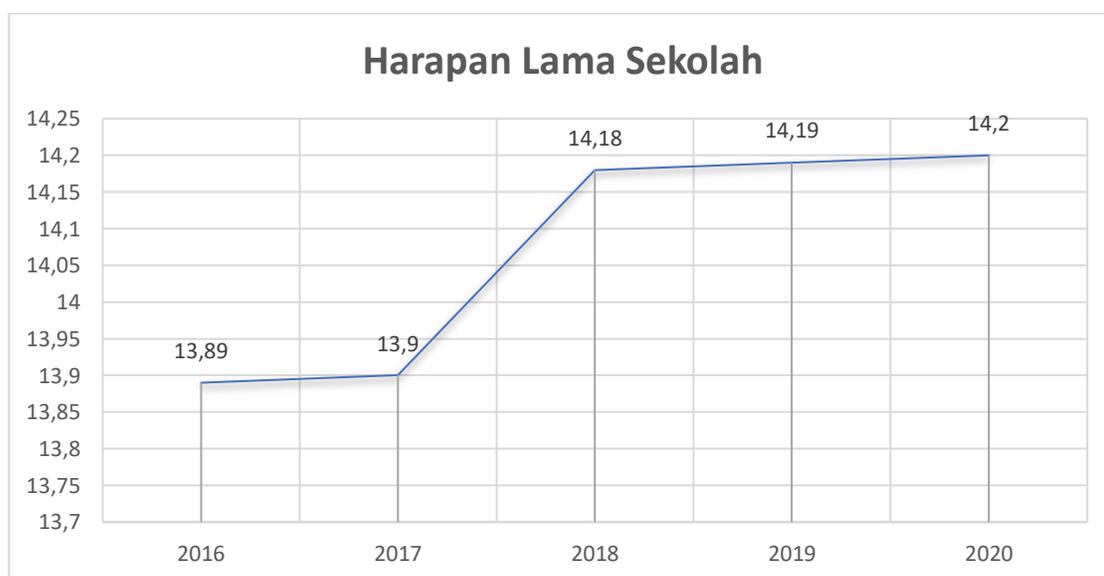
- EYS'_a : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
 E'_i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
 P'_i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
 i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ;
 FK : Faktor koreksi.

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia menunjukkan kemajuan sepanjang 2011-2020. Ini tercermin dari membaiknya Harapan Lama Sekolah (HLS)

Berikut grafik capaian indikator Harapan Lama Sekolah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:



Gambar 2.2 Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan grafik diatas, angka harapan lama sekolah di kota bandung mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Data Badan Pusat

Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan anak-anak yang pada 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,20 tahun (hingga Diploma III) lebih lama 0,01 tahun dari tahun sebelumnya yang 14.19 tahun.

2) Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan. Formulasinya: Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu X 100.

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa dalam uji kompetensi di akhir tahun ke 6 untuk jenjang sekolah dasar dan tahun ketiga untuk jenjang sekolah menengah pertama. Angka kelulusan juga mencerminkan keberhasilan sekolah dalam tata kelola dan proses belajar mengajar yang membekali siswa untuk dapat lulus di ujian sekolah. Sehingga hal tersebut dipandang perlu mendapatkan perhatian untuk menjamin bahwa siswa-siswi di akhir jenjang sekolah memiliki standar kompetensi yang telah dirumuskan melalui ujian sekolah.

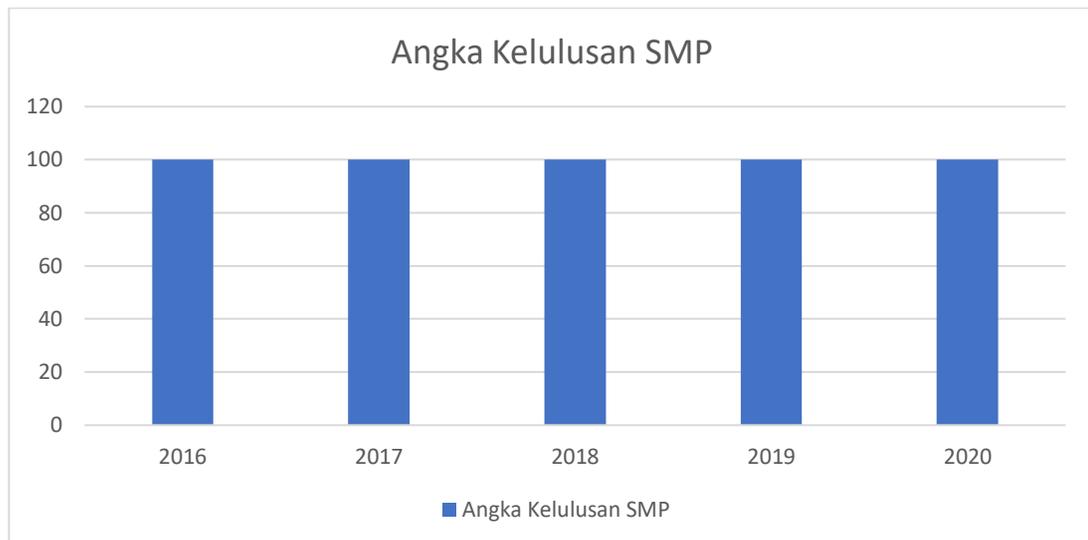
Berikut grafik capaian indikator angka kelulusan tingkat Sekolah Dasar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:



Gambar 2.3 Angka Kelulusan Sekolah Dasar

Berdasarkan grafik diatas, Angka Kelulusan pada tingkat Sekolah Dasar dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan angka 100.00%. Indikator kinerja ini telah terealisasi sesuai target dengan persentase capaian sebesar 100.00% sesuai target pada RPJMD

Berikut grafik capaian indikator angka kelulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:



Gambar 2.4. Angka Kelulusan SMP

Berdasarkan grafik diatas, Angka Kelulusan pada tingkat Sekolah Menengah Atas dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan angka 100.00%. Indikator kinerja ini telah terealisasi sesuai target dengan persentase capaian sebesar 100.00% sesuai target pada RPJMD

3) Rasio Ketersediaan Sekolah

Indikator rasio ketersediaan sekolah menunjukkan perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk per masing-masing jenjang pendidikan. Mengacu pada data periode 2016-2020, secara umum rasio ketersediaan sekolah pada semua tingkatan menunjukkan masih jauh dari rasio ideal atau kurang memadai, artinya jumlah siswa di semua level sekolah dan rasio jumlah siswa dengan ruang kelas berlebihan. Data rasio ketersediaan sekolah tahun 2016-2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.6

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah SD/MI	889	823	536	544	542
	Jumlah Penduduk Usia 7-12	231.174	229.718	256.200	254.710	252.931
	Rasio Ideal	52	52	52	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	38,46	35,83	20,92	21,36	21,43
2	SMP/MTs					
	Jumlah SMP/MTs	234	236	285	296	293
	Jumlah Penduduk Usia 13-15	110.218	107.890	124.594	124.896	125.386
	Rasio Ideal	52	52	52	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	21,23	21,87	22,87	23,70	23,37

Sumber: Bappeda Prov. Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bandung (Diolah) yang dikelola dalam SIPD

Data yang tersedia menunjukkan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Bandung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 disebabkan oleh adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri dari 647 Sekolah Dasar Negeri menjadi 274 Sekolah Dasar Negeri. Adapun pada tahun 2019 dan 2020 rasio ketersediaan sekolah kembali meningkat dikarenakan adanya penambahan unit sekolah baru pada jenjang sekolah dasar baik sekolah swasta maupun sekolah negeri

4) Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, data angka putus sekolah di Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI:	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs:	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Bandung pada periode 2016 sampai dengan 2020 termasuk kategori rendah (< 1%). Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya dikarenakan oleh adanya peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kemampuan dan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

5) Persentase Guru Berpendidikan > S1

Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat 1-6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2016-2020 disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 2.8

Persentase Guru Berpendidikan minimal S1 di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	96,00%	98,00%	95,03%	91,88%	93,75%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Data yang tersedia menunjukkan Persentase Guru Berpendidikan minimal S1 di Kota Bandung periode 2016 sampai dengan 2020 bersifat

fluktuatif. Pada tahun 2018 sampai 2020 Persentase Guru Berpendidikan minimal S1 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh pengurangan pendidik yang pensiun namun tidak ada penambahan ASN pendidik baru. Namun diupayakan penyediaan pendidik non ASN yang dibiayai oleh APBD.

6) **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.9

Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	%	103,96	104,56	106,89	102,93	103,06
2	SMP/MTs	%	98,07	89,61	86,68	86,26	87,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2021

Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk APK tingkat SD/MI melampaui 100%, yaitu 103,06% dan untuk APK SMP/MTs 87,13%. Meski APK untuk jenjang sekolah menengah belum mencapai seperti halnya APK pada jenjang sekolah dasar, hal ini menjadi perhatian khusus agar siswa yang bersekolah terus dapat ditingkatkan

7) **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI/Paket A	95,63%	97,22%	98,88%	98,73%	99,06%
2	SMP/MTs/Paket B	86,57%	83,53%	79,58%	80,00%	80,66%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2021

Capaian tingkat APM Kota Bandung pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski data menunjukkan angka yg fluktuatif, masih menjadi tugas dari Pemerintah Daerah bersama – sama seluruh stakeholder untuk dapat meningkatkan capaian APM.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Analisis SWOT merupakan suatu teknik strategi perencanaan yang dilaksanakan melalui identifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu organisasi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam menyusun perencanaan yang baik. Kekuatan (Strength) bersumber dari kondisi internal yang dimiliki Dinas Pendidikan, Kelemahan (Weakness) bersumber dari kondisi Internal yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Peluang (Opportunity) bersumber dari kondisi eksternal, Ancaman (Threat) bersumber dari kondisi eksternal Dinas Pendidikan

Analisis SWOT terhadap penyelenggaraan pendidikan akan memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan yang harus ditempuh. Dalam hal ini, keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan akan ditentukan oleh kemampuan Dinas Pendidikan dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan (Strength) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung di antaranya:

- a. Alokasi anggaran di bidang penyelenggaraan pendidikan yang cukup besar dari APBD sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mewujudkan pengembangan dalam penyelenggaraan program pendidikan;
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dinilai cukup memadai yang bisa dilihat dari adanya kesesuaian antara kebutuhan SDM dengan jumlah SDM yang dimiliki untuk menjalankan program pelayanan pendidikan;
- c. Penguasaan dan penerapan teknologi sebagai penunjang dalam pelaksanaan program layanan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam

pengembangan program layanan pendidikan.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan (Weakness) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung di antaranya:

- a. Masih belum meratanya kualitas tenaga pendidik yang mampu berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan secara optimal;
- b. Masih belum optimalnya produktivitas kinerja yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan

3. Peluang (Opportunity)

Peluang (Opportunity) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung diantaranya:

- a. Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional sehingga banyak mendapat dukungan baik dari aspek sarana, anggaran maupun kebijakan;
- b. Kemajuan dunia teknologi informasi yang mampu memberikan dukungan terhadap peningkatan aspek mutu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
- c. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang berpengaruh terhadap peningkatan daya serap pendidikan;
- d. Terjadinya Pandemi Covid-19 memberikan peluang bagi berkembangnya pembelajaran berbasis digital dan pembelajaran jarak jauh.

4. Ancaman (Threat)

Ancaman (Threat) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung diantaranya:

- a. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan pendidikan sehingga terjadinya Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) yang melanda semua aspek kehidupan. Ini memerlukan perhatian yang sangat serius pada dunia pendidikan itu sendiri.
- b. Semakin meningkatnya usia penduduk sekolah maka perlu diimbangi dengan infrastruktur
- c. Semakin meningkatnya layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan maka perlu ditingkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan.
- d. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Sustainable Development Goals (SDGs), Education For All (EFA) dan

Education for Sustainable Development (EfSD);

- e. Hambatan aksesibilitas pendidikan yang diakibatkan oleh persoalan himpitan ekonomi keluarga.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

3.1. Permasalahan Dinas Pendidikan Kota Bandung

Permasalahan pada urusan pendidikan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

- 1) Belum optimalnya APM untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK yaitu sebesar 95,71% pada tahun 2019.
- 2) Menurunnya Rasio Ketersediaan Sekolah untuk jenjang SD/MI dan SMA/SMK.
- 3) Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal dan tersertifikasi. Pada tahun 2019 terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1 dan kualifikasi S2.
- 4) Masih adanya kekurangan dalam sistem Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga belum sesuai dengan harapan masyarakat.
- 5) Perubahan proses pembelajaran dari belajar di sekolah menjadi belajar di rumah sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
- 6) Penyebaran sekolah yang tidak merata.
- 7) Belum optimalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.
- 8) Masih belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif.
- 9) Masih ditemukan ketimpangan kualitas antar sekolah yang menimbulkan munculnya sekolah favorit.
- 10) Masih ada satuan Pendidikan Non Formal yang belum terdata dalam DAPODIK

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung

Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”.

Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis diartikan sebagai kota yang mempunyai harga diri yang dapat dibanggakan oleh seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa bermartabat sebagai pusat pertumbuhan, khususnya sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya dan nasional pada umumnya serta terlaksananya kehidupan beragama. Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis memiliki dimensi:

1. Pemenuhan kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, bersih, indah, hijau dan berbunga.
2. Pemenuhan kondisi lingkungan kegiatan ekonomi dan sosial sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya.
3. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk.
4. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis.
5. Pemenuhan wujud pembinaan umat beragama.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan

sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang merupakan manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap, dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Visi Kota Bandung 2018-2023 merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya *bertakwa* pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta kota yang teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, disusun Misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah ***Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung***. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

1. **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

3. **Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Pembangunan Kota Bandung yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 serta 3 (tiga) tahun sisa periode RPJMD sampai dengan tahun 2023 diarahkan pada beberapa fokus pembangunan. Fokus tahunan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjawab isu strategis pembangunan dan mempercepat pencapaian target sasaran pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arahan utama presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk diantaranya arahan tentang pembangunan SDM: “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global”.

Adapun Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 adalah: **“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.”**

Untuk itu misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan nawacita kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

- 2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- 3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusi;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan anak;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan;
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu disemua jenjang;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang;
3. Menguatnya karakter peserta didik;
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan;
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2020-2024 diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemdikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi disemua jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang

diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, kebijakan merdeka belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud RI untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Peningkatan Budaya, Bahasa, dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

3.3.2 Telaahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara pendidikan menengah adalah : Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu, serta Tata Kelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).

Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting untuk menuju keberhasilan pembangunan pendidikan yang dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik Pendidikan Menengah (16-18 tahun) dan Pendidikan Khusus (4-18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan. Selain peningkatan aksesibilitas, peningkatan mutu pelayanan pendidikan juga perlu dilakukan untuk mencapai outcome dalam melahirkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing. Rendahnya mutu pendidikan dapat terlihat dari kualifikasi guru dan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan Standar Nasional yang menjadi salah satu penyebab rendahnya rata-rata nilai hasil peserta didik UN SMA dan SMK di Jawa Barat apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Permasalahan ini tentunya tidak terlepas dari peran sekolah yang semestinya dapat membantu tenaga pendidik dan peserta didik agar mampu saling mendukung dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan.

Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
2. Meningkatnya mutu pendidikan
3. Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dari indikator capaian, yaitu:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, SMK, dan SLB;
2. Nilai Mutu Pendidikan SMA, SMK, dan SLB;
3. Indeks kepuasan pelayanan pendidikan menengah serta pendidikan khusus dan layanan khusus.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk meningkatnya aksesibilitas pendidikan salah satunya dengan peningkatan daya tampung satuan pendidikan.
- b. Sasaran strategis untuk meningkatnya mutu pendidikan diantaranya dengan Pemberdayaan sekolah (sekolah juara, SMK juara, guru juara, budaya juara, PT juara) dan pemberdayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 s.d. 13 sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi
- c. Sasaran strategis tata kelola dinas pendidikan yang profesional dan akuntabel (reformasi birokrasi) diantaranya meningkatnya SAKIP Dinas Pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan yang profesional, Monitoring & Evaluasi Pengendalian, Sistem Informasi Dinas Pendidikan pengelolaan sekolah juara, Pengelolaan anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program yang tertuang dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 terdiri dari 6 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 9 kegiatan dan 22 Sub kegiatan;
2. Program Pengelolaan Pendidikan dengan 3 kegiatan dan 154 sub kegiatan;
3. Program Pengembangan Kurikulum dengan 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan;
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan;

6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, dengan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

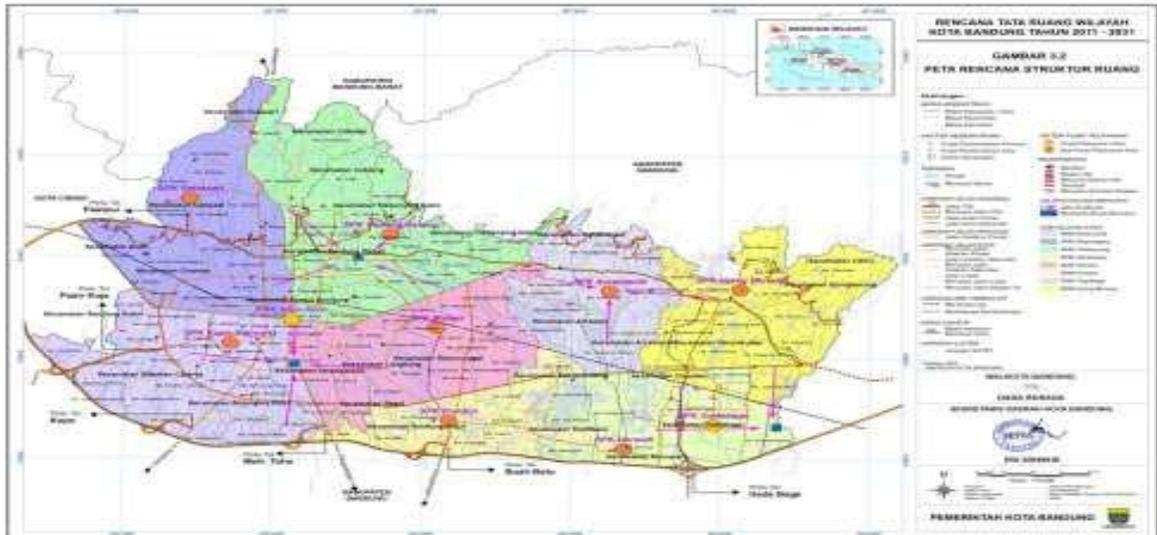
Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan

PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

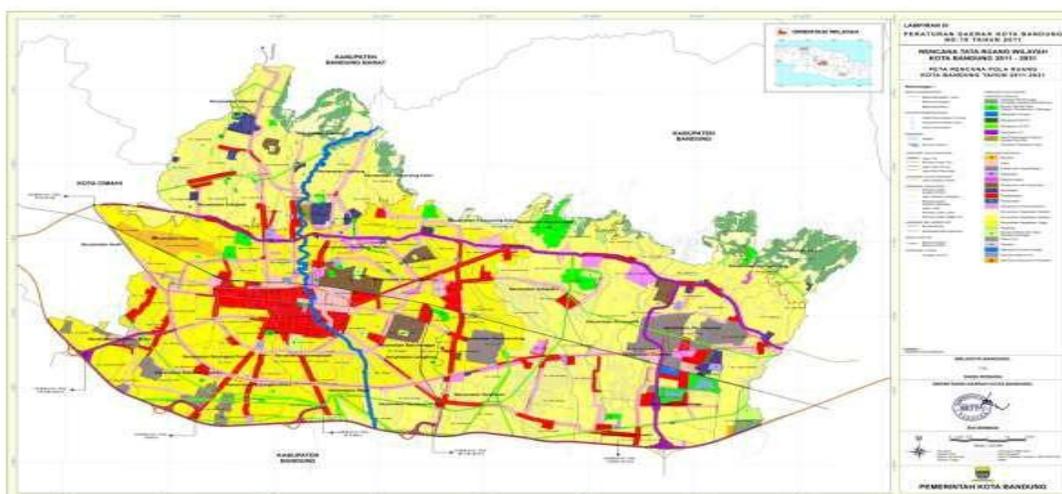
Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutans lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.



Gambar 3.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat pendidikan menengah pertama. Sampai dengan saat ini layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal karena rasio rombongan belajar (rombel) belum memenuhi standar nasional. Selain itu kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Serta terminologi sekolah favorit menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah tersebut.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Pendidikan Kota Bandung telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Perubahan Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandung

TUJUAN (2018-2023)	TUJUAN (Hasil Reviu : 2021 s.d 2023)
Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.2

Perubahan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung

SASARAN (2018-2023)	SASARAN (Hasil Reviu : 2021 s.d 2023)
1. Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan	1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
2. Meningkatkan mutu proses pembelajaran	2. Terwujudnya Mutu Pembelajaran
3. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan	
5. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Secara ringkas, kerangka logis tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung setelah dilakukan Reviu oleh Tim yaitu mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah “Meningkatnya Pendidikan Masyarakat” dengan Indikator Tujuan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Pendidikan Setelah Reviu

MISI KOTA BANDUNG	TUJUAN	SASARAN
Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
		2. Terwujudnya Mutu Pembelajaran
		3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah “Meningkatnya Pendidikan Masyarakat” dengan Indikator Tujuan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

4.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan, seperti yang tergambar pada table berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021-2023

INDIKATOR KINERJA (periode Tahun 2018-2020)	Ket	INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2021)	Ket
1. Harapan Lama Sekolah	IKU	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	IKU
2. Angka Kelulusan	IKU	2. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	
3. Rata-Rata Nilai Ujian SD	IKU	3. Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	IKU

INDIKATOR KINERJA (periode Tahun 2018-2020)	Ket	INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2021)	Ket
4. Rata-Rata Nilai Ujian SMP	IKU	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	IKU
5. Indeks Kepuasan Masyarakat	IKU		

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021-2023, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung setiap tahunnya. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.5

Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun			Target Akhir Renstra	Satuan
				2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	$APK\ PAUD = (\text{Siswa PAUD} / \text{Penduduk usia PAUD}) \times 100\%$ $APK\ SD = (\text{Siswa SD} / \text{Penduduk usia SD}) \times 100\%$ $APK\ SMP = (\text{Siswa SMP} / \text{Penduduk usia SMP}) \times 100\%$	98,55	92,70	92,77	92,86	92,86	Persen
		Angka Partisipasi Murni (APM)	$APM\ PAUD = (\text{Siswa usia PAUD} / \text{Penduduk usia PAUD}) \times 100\%$	90,04	90,10	90,17	90,23	90,23	Persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun			Target Akhir Renstra	Satuan
				2020	2021	2022	2023		
		Pendidikan Dasar	$\text{APM SD} = \left(\frac{\text{Siswa usia SD}}{\text{Penduduk usia SD}} \right) \times 100\%$ $\text{APM SMP} = \left(\frac{\text{Siswa usia SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}} \right) \times 100\%$						
	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100	100	100	100	100	100	Persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun			Target Akhir Renstra	Satuan
				2020	2021	2022	2023		
			$\text{Persentase AL} = \frac{JL}{JL2} \times 100$ <p>JL: Jumlah Siswa JL2: Jumlah Siswa tahun sebelumnya</p>						
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/ Jumlah Unsur	83,88	85,00	85,05	85,10	85,10	Poin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun			Target Akhir Renstra	Satuan
				2020	2021	2022	2023		
			IKM: (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018-2023, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi daerah yang tercantum dalam RPJMD perubahan 2018-2023 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres, Perda atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga dituangkan dalam kerangka regulasi Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan Kota Bandung, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Pemerintah Kota Bandung 2018-2023 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan setelah perubahan PRJMD

Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang nyaman, unggul, sejahtera, dan agamis				
Misi I: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	- Mewujudkan aksesibilitas siswa PAUD	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasana PAUD - Penyediaan PTK Non ASN pada Jenjang PAUD
			- Mewujudkan aksesibilitas siswa SD	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasana Sekolah Dasar - Penyediaan PTK Non ASN pada Jenjang Sekolah Dasar
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar		- Memberikan Bantuan Pendidikan Operasional untuk Sekolah Dasar Swasta

Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang nyaman, unggul, sejahtera, dan agamis

Misi I: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			- Mewujudkan aksesibilitas siswa SMP Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasana Sekolah Menengah Pertama - Penyediaan PTK Non ASN pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama - Memberikan Bantuan Pendidikan Operasional untuk Sekolah Menengah Pertama Swasta
	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengimplementasikan Kurikulum Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengimplementasi Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar pada tiap satuan pendidikan - Mengembangkan Kurikulum Lokal dan mengimplemantasikan kepada tiap satuan pendidikan
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Bantuan Pendidikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi - Meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui

Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang nyaman, unggul, sejahtera, dan agamis				
Misi I: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Workshop, Bintek, Sosialisasi dan Kegiatan lainnya
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pendidikan - Meningkatkan sarana prasarana Dinas Pendidikan - Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pendidikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pendidikan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018-2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kota Bandung dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program yang akan dilaksanakan terdiri dari Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penyajian Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung Sebelum Perubahan RPJMD pada Tabel 6.1 dan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung Setelah Perubahan RPJMD pada Tabel 6.2

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung Sebelum Perubahan RPJMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				755,949,030,283		731,130,248,751.96		741,394,372,693.91		769,658,496,637.45		788,922,620,579.99
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,013,271,678	100%	3,660,000,000	100%	3,983,782,454	100%	4,086,054,115	100%	4,188,325,777

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	-	12 Bulan	540.319.336	12 Bulan	1.550.000.000	12 Bulan	1.705.000.000	12 Bulan	1.875.500.000	12 Bulan	2.063.050.000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah lembaga yang disediakan ATK	-	1 lembaga	735.282.556	1 lembaga	200.000.000	1 lembaga	220.000.000	1 lembaga	242.000.000	1 lembaga	266.200.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	-	3 Jenis	384.859.200	3 Jenis	600.000.000	3 Jenis	660.000.000	3 Jenis	726.000.000	3 Jenis	798.600.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	-	12 laporan	205.392.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	440.000.000	12 laporan	484.000.000	12 laporan	532.400.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	-	12 laporan	150.585.600	12 laporan	160.000.000	12 laporan	176.000.000	12 laporan	193.600.000	12 laporan	212.960.000
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	36 laporan	470.500.500	36 laporan	400.000.000	36 laporan	440.000.000	36 laporan	484.000.000	36 laporan	532.400.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	-	12 laporan	1.526.328.000	12 laporan	350.000.000	12 laporan	385.000.000	12 laporan	423.500.000	12 laporan	465.850.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	3,076,686,999	100%	2.850.000.000	100%	3,054,079,730	100%	3,132,484,064	100%	3,210,888,397
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah perlengkapan peralatan aparatur	-	6 Jenis	950.350.961	6 Jenis	1.100.000.000	6 Jenis	1.210.000.000	6 Jenis	1.331.000.000	6 Jenis	1.464.100.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	4 laporan	61.050.000	4 laporan	800.000.000	4 laporan	880.000.000	4 laporan	968.000.000	4 laporan	1.064.800.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	-	130 Unit	1.022.739.600	130 Unit	500.000.000	130 Unit	550.000.000	130 Unit	605.000.000	130 Unit	665.500.000
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	-	1 gedung	352.413.325	1 gedung	250.000.000	1 gedung	275.000.000	1 gedung	302.500.000	1 gedung	332.750.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengelolaan Aset Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah yang dikelola asetnya	-	331 Sekolah 297.648.500	331 Sekolah 200.000.000	331 Sekolah 220.000.000	331 Sekolah 242.000.000	331 Sekolah 266.200.000					
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	-	390.465.074	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	168,811,600,000	100%	300.000.000	100%	167,571,184,843	100%	171,873,072,213	100%	176,174,959,582
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	486 Stel	170.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Peningkatan Mutu PTK Non PNS	Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS yang diberi honor	-	13256 Org	167.487.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	-	3 Kegiatan	186.344.000	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	330.000.000	3 Kegiatan	363.000.000	3 Kegiatan	399.300.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	56%	57%	5,085,328,910	100%	13.050.732.263	100%	5,047,962,289	100%	5,177,553,574	100%	5,307,144,860
Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang difasilitasi sarana bermain Jumlah gedung yang direhabilitasi	-	3 lembaga 1 Unit	2.436.979.266	3 lembaga 1 Unit	8.557.613.623	3 lembaga 1 Unit	9.413.374.985	3 lembaga 1 Unit	10.354.712.484	3 lembaga 1 Unit	11.390.183.732

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga PAUD yang dibina proses pembelajarannya	-	30 lembaga		30 lembaga		30 lembaga		30 lembaga		30 lembaga	
	Jumlah siswa yang mendapatkan BOP Pusat Jumlah Bunda PAUD yang dibina		1160 Siswa		1160 Siswa	533.517.600	1160 Siswa		1160 Siswa	645.556.296	1160 Siswa	
	Jumlah siswa yang difasilitasi kegiatan olimpiade kreatifitas siswa		181 lembaga		181 lembaga		181 lembaga		181 lembaga		181 lembaga	
			1500 Siswa		1500 Siswa		1500 Siswa		1500 Siswa		1500 Siswa	
	Jumlah lembaga PAUD yang dibina		1100 lembaga		1100 lembaga		1100 lembaga		1100 lembaga		1100 lembaga	
												710.111.926

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik PAUD	Jumlah lembaga yang diberi Biaya operasional Penyelenggaraan DAK nonfisik	-	-	300.000.000	3.154.210.000			3.469.631.000			3.816.594.100			4.198.253.510
Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD	-	1000 lembaga	764.637.500	697.171.040	1000 lembaga		766.888.144			843.576.958			927.934.654

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pelaksanaan Pendidikan PAUD	Jumlah TK negeri yang mendapatkan bantuan operasional	-	3 Sekolah	442.644.144	3 Sekolah	108.220.000	3 Sekolah	119.042.000	3 Sekolah	130.946.200	3 Sekolah	144.040.820
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Paud Dikmas						108.220.000						

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	100%	100%	10,801,552,561	100%	7.831.780.642	100%	10,722,183,551	100%	10,997,443,442	100%	11,272,703,332
Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal	Jumlah lembaga yang diakreditasi	-	100 lembaga	758.874.600	100 lembaga	700.000.000	100 lembaga	770.000.000	100 lembaga	847.000.000	100 lembaga	931.700.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya operasional penyelenggaraan Paket A, B dan C	-	3000 Orang	4.936.032.500	3000 Orang	3.455.222.750	3000 Orang	3.800.745.025	3000 Orang	4.180.819.528	3000 Orang	4.598.901.480
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center	Jumlah peserta kegiatan assesment center	-	1000 Orang	587.837.706	1000 Orang	550.000.000	1000 Orang	605.000.000	1000 Orang	665.500.000	1000 Orang	732.050.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal	Jumlah warga yang mengikuti pendidikan masyarakat	-	800 orang	866.882.000	800 orang	606.630.892	800 orang	667.293.981	800 orang	734.023.379	800 orang	807.425.717
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas	Jumlah lembaga yang dikembangkan kemitraannya	-	150 lembaga	443.247.746	150 lembaga	400.000.000	150 lembaga	440.000.000	150 lembaga	484.000.000	150 lembaga	532.400.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Kelulusan Kesetaraan Paket A Jumlah Kelulusan Ujian Kesetaraan Paket B Jumlah Kelulusan Ujian Kesetaraan Paket C	-	300 Orang	1.049.007.200	300 Orang	1.153.907.920	300 Orang	1.269.298.712	300 Orang	1.396.228.583	300 Orang	1.535.851.442
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SKB	Jumlah Pendidikan SKB yang disediakan DAK Fisik	-	-	2.939.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik Kesetaraan	Jumlah lembaga yang diberi Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik Kesetaraan	-	-	1.205.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan SKB	Jumlah Warga Masyarakat/Warga Belajar yang difasilitasi oleh SKB	-	1000 Orang	1.230.299.609	1000 Orang	1.200.000.000	1000 Orang	1.320.000.000	1000 Orang	1.452.000.000	1000 Orang	1.597.200.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	50.59%	51.75%	4,332,632,000	52.55%	172.879.290.000	53.35%	4,300,796,140	54.14%	4,411,206,177	54.95%	4,521,616,213

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung Setelah Perubahan RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar 2. Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas 3. Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar 4. Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi 5. Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	1. 11,36 2. 35,82 3. 34,30 4. 2 5. 100%	564.613.612.444	1. 11,65 2. 35,67 3. 34,07 4. 2 5. 100%	307.516.804.018	1. 11,94 2. 35,52 3. 33,84 4. 2 5. 100%	353.617.505.474
		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Telaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	82.510.553.100	100%	44.939.372.746	100%	51.676.359.407

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah satuan pendidikan TK Negeri yang difasilitasi pembangunannya	2	3.829.003.150	2	2.085.466.566	2	2.398.104.673
		1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Dikelola BOP PAUD	1.000	30.118.918.850	1.000	16.404.269.152	1.000	18.863.478.876
		1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peraturan Pemerintah	-	79.900.300	-	43.517.698	-	50.041.558
		1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah satuan PAUD yang difasilitasi pembelajaran inklusifnya	64	418.875.800	64	228.140.704	64	262.341.914
	Jumlah satuan PAUD yang difasilitasi pembelajaran PAUD HIBER		60	60		60			
	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi biaya langganan internetnya		4	4		4			

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terfasilitasinya Honor Tata Usaha dan Penjaga Sekolah Non PNS di TK Negeri	4		4		4	
		1.01.02.2.03.12	Jumlah Lembaga Yang Diberi Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100	48.000.000.000	100	26.143.200.000	100	30.062.400.000
		1.01.02.2.03.10	Jumlah siswa PAUD yang difasilitasi perlengkapan alat pembelajarannya	450	63.855.000	450	34.778.626	450	39.992.387
		1.01.02.2.03.15	Jumlah PTK Non PNS PAUD Formal dan Non Formal/Kesetaraan yang difasilitasi honorinya	-	-	3.371	15.768.000.000	3.371	17.344.800.000
		1.01.02.2.03.19	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti bintek dalam Penyusunan laporan BOP PAUD	-	-	1.250	354.072.000	1.250	389.479.200

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kes etaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Keseta raan	100%	16.952.836.570	100%	9.233.362.438	100%	10.617.561.544
		1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kese taraan	Tersedianya bahan evaluasi satuan pendidikan Kesetaraan	1	215.170.000	1	117.192.341	1	134.760.971
			Terselenggaranya proses belajar nonformal/ keseta raan	60		60		60	
		1.01.02.2.04.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kese taraan	Terpeliharanya gedung/ ruang kelas	1	71.616.820	1	39.006.101	1	44.853.614
		1.01.02.2.04.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kese taraan	Tersedianya alat rumah tangga pnf	10	1.815.000	10	988.540	10	1.136.735
		1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraa n Proses Belajar Nonformal/ Kese taraan	Terselenggaranya proses belajar nonformal/ keseta raan	60	206.425.000	60	112.429.376	60	129.283.978

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kese taraan	Terpeliharanya gedung/ruang kelas	1	685.389.213	1	685.389.213	1	685.389.213
			Tersedianya mebeleur pnf	80		80		80	
		1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kese taraan	Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan asesment center	150	1.070.455.400	150	583.023.534	150	670.426.217
			Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan dan kemitraan PAUD DIKMAS	4		4		4	
			Terfasilitasinya penjaminan mutu pnf	150		150		150	
			Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan non formal	1		1		1	
			Tersedianya bahan evaluasi satuan pendidikan Kesetaraan	1		1		1	
			Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetara an	60		60		60	

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Dikelola BOP Non Formal/Kesetaraan	60	15.071.645.000	60	8.208.771.449	60	9.439.371.264
			Jumlah lembaga SKB Yang Dikelola BOP Non Formal/Kesetaraan	1		1		1	
		1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga satuan pendidikan kesetaraan yang dibina	-	-	90	364.521.000	90	400.973.100
		1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	15.071.645.000	100%	8.208.771.449	100%	9.439.371.264
		1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dokumen Instrumen Kompetensi Minimal Siswa Sekolah Dasar	1	72.520.000	1	39.498.018	1	45.419.276
		1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana,	Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri	16	18.231.340.000	16	9.929.699.331	16	11.418.288.242

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri	16		16		16	
			Pembangunan Sanitasi Sekolah	20		20		20	
			Pembangunan Benteng/Pagar SD	19		19		19	
			Pembuatan sumur bor	13		13		13	
		1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Ruang Kelas SD	48	28.239.847.250	48	15.380.832.805	48	17.686.616.333
		1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebeluer Sekolah	100	34.373.969.100	100	18.721.782.270	100	21.528.416.847
		1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa SD yang diberi bantuan	40.681	31.527.775.000	40.681	17.171.602.654	40.681	19.745.845.483
		1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD Swasta Yang Diberikan Bantuan Sosial	7.796	16.320.960.000	7.796	8.889.210.864	7.796	10.221.817.248

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1	267.920.000	1	145.922.628	1	167.798.296
		1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Dasar yang di fasilitasi dalam pengembangan kegiatan kesiswaan	457	583.759.320	457	317.944.514	457	365.608.462
		1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Yang di Fasilitasi Dalam Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis	274	470.621.200	274	256.323.837	274	294.750.058
		1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengelolaan BOS	462	293.600.000	462	159.909.240	462	183.881.680
		1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Laptop	1.209	63.877.010.750	1.209	34.790.613.905	1.209	40.006.171.833
	Pengadaan Komputer		274	274		274			
	Pengadaan alat Hybrid Learning untuk PJJ dan PTM		274	274		274			
	Pengadaan alat Prokes PTMT		274	274		274			

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah PTK Non PNS SD Negeri dan Swasta yang difasilitasi honorinya	-	-	1.365	53.045.740.000,00	1.365	58.350.314.000
		1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang difasilitasi dalam Peningkatan Pengelolaan Dana BOS	-	-	426	273.100.000	426	300.410.000
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	270.890.900.154	100%	147.540.728.769	100%	169.658.970.766
		1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tercapainya peningkatan mutu pengelola pendidikan	250	244.560.000	250	133.199.604	250	153.167.928
		1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah fasilitas sekolah yang disediakan meubelair	40	27.470.510.350	40	14.961.813.462	40	17.204.780.632

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.02.02	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	32	37.716.578.534	32	20.542.334.499	32	23.621.893.136
			Rehabilitasi Ruang Kelas	9		9		9	
			Pembangunan Lapang Olahraga/Upacara	6		6		6	
			Pembangunan Toilet	2		2		2	
		1.01.02.2.02.01	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	2	9.479.370.200	2	5.162.938.979	2	5.936.929.556
		1.01.02.2.02.28	Jumlah siswa SMP yang diberi bantuan	-	20.660.475.000	-	11.252.727.709	-	12.939.655.493
		1.01.02.2.02.32	Jumlah Siswa SMP Swasta Yang Diberikan Bantuan Sosial	10.917	62.354.175.000	10.917	33.961.201.414	10.917	39.052.419.803
			Jumlah Mahasiswa Yang diberi Bantuan	3.191		3.191		3.191	
		1.01.02.2.02.36	Tercapainya Jumlah Sekolah yang difasilitasi Proses Belajar Mengajar	250	366.970.000	250	199.870.211	250	229.833.311

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tercapainya peningkatan prestasi siswa	264	595.958.000	264	324.588.525	264	373.248.495
		1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengelolaan BOS	234	268.326.700	234	146.144.137	234	168.053.012
		1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah Yang Difasilitasi Peralatan TIK	75	111.733.976.370	75	60.855.910.230	75	69.978.989.401
		1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah PTK Non PNS SMP Negeri dan Swasta yang difasilitasi honorinya	-	-	1.085	34.764.350.000,00	1.085	38.240.785.000
		1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	235	250.000.000	235	275.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	1	839.325.000	1	588.912.386	1	525.669.248
		1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2	550.410.000	2	386.195.177	2	344.721.783
		1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tercapainya Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengembangan Kurikulum SMP	250	50.410.000	250	35.370.177	250	31.571.783
		1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kurikulum	1	500.000.000	1	350.825.000	1	313.150.000

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	288.915.000	1	202.717.210	1	180.947.465
		1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya bahan evaluasi satuan pendidikan Kesetaraan	1	151.435.000	1	106.254.368	1	94.843.741
			Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetaraan	60		60		60	
			Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan non formal	1		1		1	
		1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya bahan evaluasi satuan pendidikan Kesetaraan	1	137.480.000	1	96.462.842	1	86.103.724
			Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetaraan	60		60		60	
			Tersusunnya kompetensi dasar muatan lokal	1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			pendidikan non formal						
			Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan non formal	1		1		1	
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	71,46	152.428.762.900	71,81	200.000.255.513	72,15	229.999.760.340
		1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersusunnya dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	152.428.762.900	1	10.336.029.519	1	11.886.406.375

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpetakan PTK Jenjang PAUD dan Dikdas Non ASN	2.000	7.877.530.900	2.000	10.336.029.519	2.000	11.886.406.375
		1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tertatanya Pendidistribusian PTK Jenjang PAUD dan Dikdas Non ASN	10.000	144.551.232.000	-	-	-	-
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.099.406.241.985	100%	1.292.011.492.856	100%	1.485.419.899.640

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	8	522.402.500	8	659.130.906	8	658.958.514
		1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rensra dan Renja Pendidikan	2	186.112.500	2	234.823.725	2	234.762.308
			Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pendidikan	4		4		4	
		1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	2	16.090.000	2	20.301.236	2	20.295.926
		1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan evaluasi Pendidikan	4	320.200.000	4	404.005.946	4	403.900.280
		1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah	2	1.080.022.578.275	2	1.461.351.556.387	2	1.460.969.346.236

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya Gaji dan Tunjangan ASN (Jiwa)	19.629	1.079.900.434.275	19.629	1.461.197.443.638	19.629	1.460.815.273.794
		1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	122.144.000	2	154.112.749	2	154.072.442
		1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	77.887.200	4	98.272.617	4	98.246.914
		1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD	6	77.887.200	6	98.272.617	6	98.246.914
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	13.236.066.630	100	16.700.342.349	100	16.695.974.447
		1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya perlengkapan administrasi alat tulis kantor (Paket)	1	376.463.590	1	474.995.405	1	474.871.172

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang disediakan komponen dan instalasi kelistrikan	1	44.979.000	1	56.751.354	1	56.736.511
		1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12	489.001.640	12	616.988.039	12	616.826.669
		1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang Diimplementasikan (sistem)	1	11.671.760.400	1	14.726.610.249	1	14.722.758.569
			Jumlah Koneksi Jaringan Pendidikan SD	274		274		274	
			Jumlah Koneksi Jaringan Pendidikan SMP	62		62		62	
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Pendidikan	2		2		2	
			Jumlah Kegiatan Bintek Digitalisasi Pendidikan	6		6		6	
			Jumlah Pengadaan Data Center	1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Jumlah Pengadaan Scanner Digitalisasi Dokumen	140		140		140	
		1.01.01.2.06.09	Jumlah pelaksana/peserta Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Orang)	120	134.385.000	120	169.557.586	120	169.513.239
		1.01.01.2.06.08	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)	12	77.498.000	12	97.781.552	12	97.755.977
		1.01.01.2.06.06	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	3	338.969.000	3	427.687.356	3	427.575.497
		1.01.01.2.06.05	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	3	103.010.000	3	129.970.807	3	129.936.814
		1.01.01.2.08	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	4.014.400.000	12	5.065.088.912	12	5.063.764.160

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Personil Office Boy	12	3.401.260.000	12	4.291.471.780	12	4.290.349.364
			Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	1		1		1	
			Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor	1		1		1	
			Tersedianya Personil Security	8		8		8	
			Tersedianya Personil Non PNS	35		35		35	
			Tersedianya Personil Supir	2		2		2	
		1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	613.140.000	12	773.617.132	12	773.414.796
		1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	1.532.907.380	12	1.934.115.229	12	1.933.609.369

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pemerintahan Daerah							
		1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	2	152.845.000	2	192.849.122	2	192.798.683
		1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	131	816.515.000	131	1.030.221.471	131	1.029.952.021
		1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang direhabilitasi Sedang/Berat	1	563.547.380	1	711.044.636	1	710.858.665

Tujuan	Sasaran	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Anggaran					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1	250.908.000	1	301.089.600
		1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang diberi pelatihan	-	-	100	250.908.000	100	301.089.600

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Bandung.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD dari sisi keberhasilan penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran rencana strategis perubahan. Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu rencana membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan. Indikator kinerja dimaksud juga perlu bagi publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Target Akhir Renstra	Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Sebelum Perubahan									
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.90	14.00	14.01	14.02	14.03	14.04	14.04	Tahun
2	Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100	100	%
3	Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	76.72	76.74	76.76	76.78	76.80	76.82	76.82	Nilai
4	Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	57.02	57.03	57.04	57.05	57.06	57.07	57.07	Nilai
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.75	83.80	83.85	83.90	83.95	84.00	84.00	Indeks

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Target Akhir Renstra	Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Setelah Perubahan									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	-	-	-	92,70	92,77	92,86	92,86	Persen
2	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	-	-	-	90,10	90,17	90,23	90,23	Persen
3	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	-	-	-	100	100	100	100	Persen
4	Indeks Kepuasan Masyarakat				85,00	85,05	85,10	85,10	Poin

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan, partisipasi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Dinas Pendidikan, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Renstra perubahan harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai pada periode 2021-2023. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Eselon II, III, IV, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta Sekolah dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan selama tiga tahun mendatang.

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Bandung khususnya, dan Pendidikan Nasional umumnya, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia unggul yang dapat bersaing secara global.